

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Disusun Oleh:
HERDIYANSA
2021120029

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Disusun oleh :

Nama : Herdiyansa

NIM : 2021120029

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Chairani Adelina, S.E., M.Si

NIDN. 0220049201

14-08-2025



Pembimbing I

2. Linggariama, S.E, M.Si

NIDN. 0221018201

14-08-2025



Pembimbing II

Mengetahui,

Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Prabumulih



Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si

NIDN. 0217019401

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten
Muara Enim

Disusun oleh :

Nama : Herdiyansa

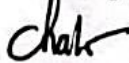
NIM : 2021120029

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S.E) pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,

Ketua Penguji



. Chairani Adelina, S.E., M.Si

NIDN. 0220049201

Anggota Penguji I



Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si.

NIDN. 0217019401

Anggota Penguji II



Meirani Betriana, S.E., M.Si.

NIDN. 00205058302

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Prabumulih



Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si

NIDN. 0217019401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdiyansa

NIM : 2021120029

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh "Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim" merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Dan tidak melakukan plagiat atau penjiplakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan pedoman penulisan skripsi. Apabila nantinya ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian hasil karya saya ini, maka saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya tanpa melibatkan nama lembaga tempat saya mendapatkan gelar kesarjanaan.

Prabumulih, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number 'A21AMX40364908'.

NIM: 2021120029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Disaat aku yakin kamu bisa wujudin mimpimu. Di situlah kamu harus yakin bisa menggapainya”

-Yansa-

“Selama masih hidup, kesempatan itu tak terbatas”

-Monkey D Luffy-

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung”

(Q,S Al-Imron 3:137)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua orang tua ku (Ayah Fitrah ismail dan mamak Sumarni).
- ❖ Semua keluarga tercinta yang telah memberikan Do'a dan dukungan moral maupun material.

Terimakasih untuk semua perjuangan, pengorbanan dan semangatnya.

**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim**

Oleh :

Herdiyansa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih

Email: herdiyansa99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. sebanyak 20 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu berupa hasil kuisisioner yang di peroleh dari responden di masing- masing Desa yang ada di Kecamatan Belida Darat . Teknik Sampling yang digunakan adalah teknik *probability sampling* dengan menggunakan pendekatan *cluster random sampling* yang di olah dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* Versi 26. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas Berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikan $0,00 < 0.05$. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa $0,030 < 0.05$ Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat dengan nilai signifikan F sebesar $0,00 < 0,05$.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

The Influence of Accountability and Transparency on Village Fund Management in Belida Darat District, Muara Enim Regency

By:

Herdiyansa

Faculty of Economics and Business, Prabumulih University

Email: herdiyansa99@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accountability and transparency on Village Fund Management in Belida Darat District, Muara Enim Regency. as many as 20 respondents, The data used in this study is primary data, namely in the form of questionnaire results obtained from respondents in each village in Belida Darat District. The sampling technique used is the probability sampling technique using a cluster random sampling approach processed using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 26 computer program. The results of the study indicate that Accountability has a significant effect on Village Fund Management with a significant value of $0.00 < 0.05$. Transparency has a significant effect on Village Fund Management $0.030 < 0.05$ Accountability and Transparency have a simultaneous effect on Village Fund Management with a significant value of F of $0.00 < 0.05$.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Management*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun dari segi disiplin ilmu. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Semoga rahmat dan hidayah-Nya senantiasa terlimpah kepada kita semua, Amin.

Prabumulih, 10 Juni 2025

Herdiyansa

Nim : 2021110029

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan Insya Allah keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai Pihak penulis sangat kesulitan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang Mamak dan Ayah. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak nomer empat ini. Mamak adalah orang yang sangat berperan penting bagi penulis untuk terus berjuang berusahan dan memberikan yang terbaik. Mamak juga menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus tempat penulis bersandar ketika lagi capek, tanpa mamak penulis tidak akan mampu bertahan hingga saat ini. Dan Ayah yang selalu mengusahakan penulis untuk terus semangat dan memberikan dukungan untuk anak kesayangan ini. Ayah berada di barisan paling depan penulis untuk selalu terus mendoakan dan mengusahakan yang penulis inginkan. Mamak, Ayah. Terimakasih atas Do'a hebat yang selalu kalian panjatkan untuk penulis. Berkat perjuangan kalian, kesabaran kalian dan didikan kalian menjadikan penulis yang insyaallah akan selalu berbakti kepada Mamak dan Ayah. Semoga Mamak dan Ayah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, serta pastinya selalu ada dalam hati penulis dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis. Penulis minta maaf

belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap nanti Mamak dan Ayah bisa bangga dengan anak nomer empat ini.

2. Terkhusus orang tua dan saudara-saudara (Nike ismawati, Efriawan, Mawarni Marius) dan semua keluarga saya yang saya cintai, yang telah banyak memberikan dukungan, pengorbanan serta kasih sayang dan Do'a yang tulus mereka berikan kepada penulis selama menuntut ilmu dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kalian semua selalu mendapatkan keberkahan dalam berkehidupan, setiap langkah kalian semua selalu dalam lindungan dan semoga kalian selalu di berikan kesehatan serta umur yang panjang oleh Allah SWT. *Aamiin*
3. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih
4. Bapak Ajabar, S.I.P.,MM. Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas prabumulih yang telah memberikan izin untuk keperluan penelitian ini.
5. Bapak Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E.,M.Si. Selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Ibu Chairani Adelina. S.E.,M.Si. Selaku pembimbing 1, terimakasih atas arahan, bimbingan, serta kepercayaan yang telah ibu berikan. Dan juga atas waktu, kesabaran dan perhatian yang ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini, tanpa bimbingan dan dukungan yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebaikan serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang telah ibu berikan.

7. Bapak Linggariama, S.E.,M.Si. Selaku pembimbing 2, atas arahan bimbingan, serta kepercayaan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebaikan serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang telah bapak berikan.
8. Bapak Zulchaidir Sidik, S.STP.,M.Si. Selaku Camat Belida Darat atas kesediaanya memberikan izin penelitian serta membantu penulis dalam menyesuaikan penelitian.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih yang telah membantu dan memberikan ilmunya serta menghantarkan penulis menyelesaikan kesarjanaan.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat sekelas saya Agus, Wisnu, Ilham, Adet dan sahabat Boys To Man Aan, Fikri, Anjas Aldi, Randa yang telah berjuang bersama saling mensupport, memberi semangat, memberi arahan dan sama-sama mengukir cerita di balik penyelesaian skripsi ini semoga persahabatan kita abadi selamanya.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEPENGUJUI	iii
LEMBAR SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7

BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Desa	9
2.1.2 Pemerintah Desa	10
2.1.3 Pendapatan Desa Desa	10
2.1.4 Fungsi Dan Kewenangan Desa	11
2.1.5 Kewenangan Desa	12
2.1.6 Defenisi Dana Desa	14
2.1.7 Tujuan Dana Desa	15
2.1.2 Pegelolaan Dana Desa	16
2.1.3 Akuntabilitas	22
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	22
2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas	24
2.1.4 Transparansi	26
2.1.4.1 PengertianTransparansi	26
2.1.4.2 Indikator Transparansi	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikir	30
2.4 Hipotesis	32

BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Data	34
3.2.1 Jenis Data	34
3.2.2 Sumber Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.3 Populasi Dan Sampel	36
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel.....	36
3.3.3 Teknik Sampling	36
3.4 Defenisi Oprasional Variabel	37
3.5 Instrumen Penelitian	40
3.6 Metode Analisis	41
3.6.1 Uji Instrumen	41
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
3.6.4 Uji Hipotesis	46

BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum	48
4.1.1 Sejarah Kecamatan Belida Darat	48
4.1.2 Letak Geografis	48
4.1.3 Visi Dan Misi	49
4.1.4 Struktur Organisasi	50
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Deskripsi Responden	51
4.2.2 Hasil Pengujian Data.....	54
4.2.2.1 Uji Validitas	54
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	57
4.2.2.3 Uji Asumsi Klasik	58
4.2.2.4 Pengujian Signifikansi	64
4.3 Pembahasan	67
4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat	67
4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat	67

4.3.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat	69
BAB V	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa di Kecamatan Belida Darat.....	4
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Pengukuran Instrumen Skala Likert.....	40
Tabel 3.3 Interpretasi nilai r Alpha Indeks Korelasi	42
Tabel 4.1 Jenis Kelamin dan Responden	51
Tabel 4.2 Usia Responden	52
Tabel 4.3 Pendidikan Tertinggi	43
Tabel 4.4 Lama Bekerja	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.12 Hasil Uji T	64
Tabel 4.13 Hasil Uji F	66
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial dan politik Negara. Dalam pemerintahan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai tanggungjawab terhadap pemerataan kesejahteraan dan pembangunan daerah-daerah. Adapun pemerintah daerah terbagi menjadi dua tingkat, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adanya kondisi beberapa daerah di Indonesia yang belum sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat, maka pemerintah mengalokasikan dana daerah ke dalam APBN. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatur otonomi daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 pasal 1 Tahun (2014) bahwa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana desa, Desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu program dari pemerintahan desa adalah pembangunan desa, pembangunan desa ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan Nasional karena adanya pemerataan pembangunan secara langsung berimbas kepada upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan ini berupa pembangunan fisik, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat desa. Dalam Pengelolaan dana desa seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan perwakilan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keuangan tersebut perlu transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan agar keuangan desa dikelola dalam keterbukaan, dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan juga untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa dalam Pengelolaan dana desa yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun (2023) tentang pengelolaan dana desa. Dengan adanya hal ini masyarakat dapat menilai kinerja perangkat desa yang ada di pemerintahan desa secara langsung, jika kinerja baik maka akan ada apresiasi dari masyarakat dalam kinerja tersebut, namun bila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkap kepada masyarakat maka pemerintah desa belum mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksana kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan

mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri (Arfiansyah, 2020:1-6).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Mardiasmo (2019:27). Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini dimulai dari perencanaan Dana desa, pelaksanaan Dana desa, pertanggungjawaban Dana desa, dan pengawasan Desa desa .

Transparansi digunakan untuk kepentingan publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, maka secara tidak langsung masyarakat bisa terlibat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan sebagai dorongan kepada instansi pemerintah seperti pemerintahan desa untuk selalu memperbaiki tata kelola pemerintah (*good governance*).

Menurut Kurnia, Sebrina, & Halmawati, (2019:159-180) Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dalam hal ini maka

semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Tabel 1.1
Dana Desa di Kecamatan Belida Darat
Tahun 2023 s.d. 2024

Nama Desa	Tahun	
	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Tanjung Bunut	705.636.400	818.353.129
Babat	637.966.400	738.197.929
Lubuk Semantung	637.875.400	738.197.929
Lubuk Getam	630.859.400	729.797.929
Talang Balai	756.229.400	841.456.329
Talang Beliung	621.252.400	712.997.929
Sialingan	696.159.400	801.553.129
Tanjung Tiga	624.744.400	717.197.929
Ibul	632.263.400	725.597.929
Gaung Asam	670.119.400	803.656.329
JUMLAH	6.613.106.000	7.627.006.490

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Dana Desa menunjukkan bahwa jumlah secara keseluruhan pada tahun 2023 di kecamatan Belida Darat adalah Rp. 6.613.106.000 dan pada tahun 2024 Rp 7.627.006.490. Berdasarkan data tersebut dapat di lihat bahwa Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, terdiri dari

10 Desa yang memiliki dana desa yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan perlu adanya akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dalam tahapan transparansi pemerintah desa harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Tahapan akuntabilitas juga diungkap melalui papan informasi di balai desa ataupun dirapat dan musyawarah pembangunan desa, namun hal tersebut belum dilaporkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali terkait dengan pengelolaan dan desa dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara bersama berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai informasi dari pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Sebagai acuan dalam pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu pembelajaran bagi penulis dalam bidang penelitian dan Mengungkap permasalahan secara sistematis. Hasil penelitian ini dapat menjadi Informasi tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi lembaga peneliti/akademisi

Sebagai bahan kajian materi dalam perkuliahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan transparansi pengelolaan dana desa.

c. Bagi instansi

Sebagai masukan kepada pemerintahan desa-desa yang ada di kecamatan belida darat kabupaten muara enim dalam pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dana desa.

d. Penelitian selanjutnya

Sebagai referensi yang tertarik melakukan penelitian dan juga dapat sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang akuntabilitas serta transparansi dana desa.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan Guna memahami lebih jelas skripsi ini, dilakukan dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi. Bab ini menjelaskan konsep akuntabilitas, dan

transparansi dana umum, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

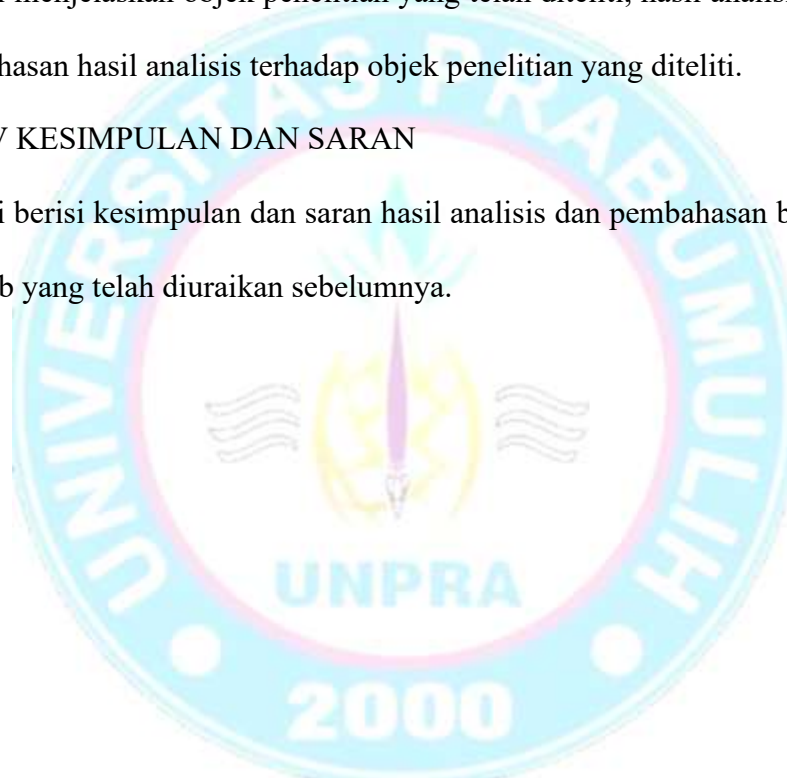
Bab ini berisikan desain penelitian, jenis data yang digunakan, variabel yang diteliti, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian yang telah diteliti, hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis terhadap objek penelitian yang diteliti.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil analisis dan pembahasan berdasarkan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Murjana, (2020) Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut para ahli kependudukan Desa dapat didartikan sebagai berikut:

1. Menurut R. Bintarto, desa yaitu perwujudan atau kesatuan *social* ekonomi, geografik, politik serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

2. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi social yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.

2.1.1.1 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2.1.1.2 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa.
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD).
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.1.3 Fungsi dan Kewenangan Desa

Beberapa fungsi desa yang bisa di optimalkan berdasarkan potensinya sebagai berikut Berdesa, (2019) :

- 1. Penyedia Bahan Mentah. Dengan adanya bahan mentah, perusahaan perusahaan yang biasanya berada dikawasan kota dapat menjalankan usahanya. Dengan pengelolaan bahan mentah yang baik maka desa sebagai penghasil bahan mentah dapat mendorong perekonomian sendiri.

2. Sumber Tenaga Kerja Diera *industry* sekarang ini tenaga kerja sangat penting, namun untuk memperoleh tenaga kerja murah tidak mudah, maka desa lah yang menjadi solusi. Di desa biasanya banyak tersedia tenaga kerja produktif, namun ada kelemahannya dibandingkan dengan tenaga kerja kota.
3. Mitra Pembangunan Kota. Desa dan kota memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan, dengan tidak semua sumber daya bisa ditemukan di kota sehingga kota membutuhkan desa, sedangkan desa membutuhkan informasi serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

2.1.1.4 Kewenangan Desa

Kewenangan desa menurut Nurcholis, (2019) ada 4 yaitu :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas dan Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertahanan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
3. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten/kota. Tugas pembantuan wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Jika tugas

pembantuan tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia desa berhak menolak.

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Kewenangan yang diserahkan dari kabupaten/ kota, dan tugas pembantuan, desa juga menerima urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan.

2.1.2 Defenisi Dana Desa

Pengertian Dana desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 13 oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Dana desa menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana desa merupakan bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.1.2.1 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Menurut Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDesa).

Sasaran Sasaran utama Dana Desa berdasarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (2014) adalah :

- a. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

2.1.2.2 Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Sujarweni, (2019 : 124).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah Sujarweni, (2019:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Hamzah, (2019:126). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan.
 - b) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Tiara Kasenda, J.S. (2019) akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Mahmudi (2019:9) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan.

Menurut Kohler dalam Waluyo (2019: 191) akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki. Jadi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator. Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

2. Tahap Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

3. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Irawatidina And Diana Martati, (2019:104), mendefinisikan transparansi sebagai kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi dapat dikatakan sebagai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait Ana dan Ga, (2022:235).

Menurut Ferarow dan Suprihanto, (2022:64-69) dalam penelitiannya menyatakan dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau anggaran. Dengan diterapkannya prinsip transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai Pakaya et al., (2019:74).

Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan suatu organisasi dalam indikatorindikator tertentu agar dapat mengukur sejauh mana prinsip transparansi

itu sudah dilaksanakan. Apabila prinsip transparansi sudah sesuai dengan indikator maka dapat dikatakan penerapan transparansinya sudah baik dan dapat mewujudkan suatu pengelolaan yang transparan, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip transparansi dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diukur dengan indikator transparansi. Kristianten (2019) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Adanya kesediaan aksesibilitas dokumen.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Adanya keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Humanitarian Forum Indonesia dalam Tundunaung, Lumolos, & Mantiri, (2022 : 32) mengemukakan ada 4 prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan.

2.1.4.2 Indikator Transparansi

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan berikut:

1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014:
 - a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana desa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kasih Elnis Gulo (2023) Melakukan penelitian Dengan Judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan metode analilis kualitatif deskriptif . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa

Edi Yanto (2020) Melakukan penelitian dengan judul penelitian "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Begitupun pengujian secara pasial (sebagian), tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab (2020) Melakukan penelitian dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Kuantitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nenry Tri Indrianasari dan Ulfah Andriani (2019) dengan judul penelitian "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas

Pengelolaan Dan desa" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban. Namun, masih ada kebutuhan akan panduan lebih lanjut karena tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

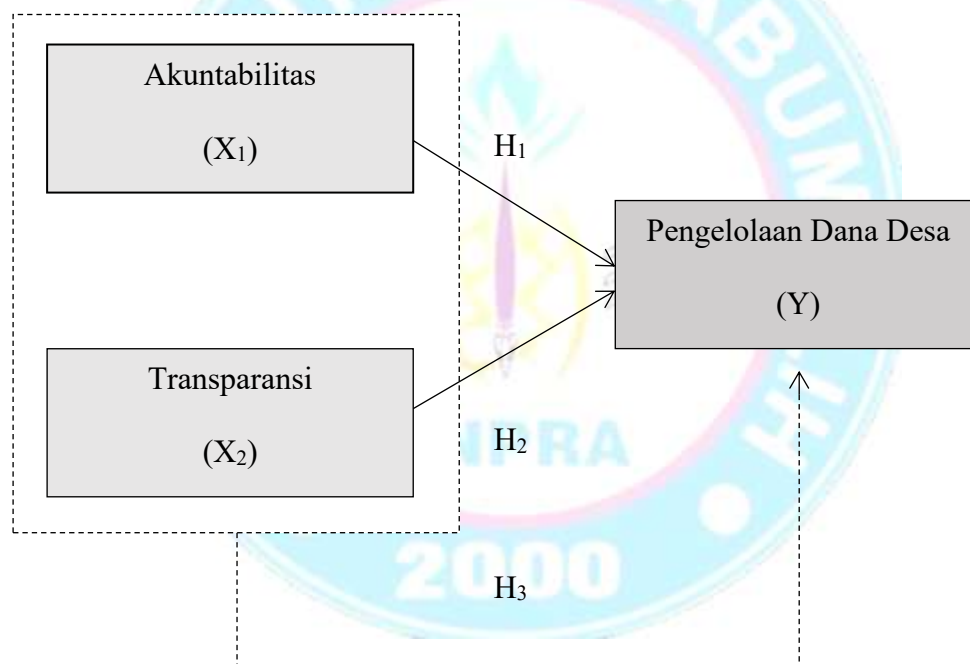
Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi Dan Herman Karamoy, (2019) Melakukan penelitian dengan judul " Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini fokus melihat pengelolaan Dana Desa pada sepuluh desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan Dana Desa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah desa hendaklah lebih berfokus untuk menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat. Namun, untuk

terciptanya kondisi tersebut hendaknya ada komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal ini perlu adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa itu sendiri. Selain itu, akuntabilitas dari realisasi dana desa yang transparan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di dukung oleh pendapat dan saran dari masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan pada skema berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan gambar :

-----> = Pengaruh Secara Simultan.

————> = Pengaruh Secara Parsial.

- X_1 : Akuntabilitas
 X_2 : Transparansi
 Y : Pengelolaan Dana Desa

2. 4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah pada bab satu maka dapat mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian Sugiyono, (2019). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Diduga akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
- H_2 : Diduga transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
- H_3 : Diduga akuntabilitas dan transparansi secara bersama berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2024: 16) jenis penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif:

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat semi (kurang berpola) dan disebut sebagai interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/emperis, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut kuantitatif karena datanya berupa angka- angka dan analisis menggunakan statistik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang di kuantitatifkan karena data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner.

3.2 Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2024: 9) menjelaskan terdapat dua jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring*.

Berdasarkan penjelasan jenis data diatas maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yang kuantitatifkan.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2024: 9) menjelaskan sumber data terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dapat berupa kuesioner maupun wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi.

Berdasarkan penjelasan sumber data tersebut maka pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan pada penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sahir (2021: 30) observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti yang turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi, yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

b. Kuesioner

Menurut Sahir (2021: 29) kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner angket efisien, responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2024: 314) dokumentasi adalah data yang berupa catatan peristiwa yang sudah terjadi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

d. Studi kepustakaan

Menurut Sugiyono (2022:291) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulandata yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan,

membaca, dan mempelajari kajian teoritis atau referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti dari sumber seperti buku, jurnal, artikel, internet serta dari sumber lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2024: 126) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa yang ada di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim .

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024: 127) sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang tersebut Dalam penelitian ini sampel yang digunakan peneliti adalah 2 orang perangkat desa yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Belida Darat.

3.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2022: 128) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan pengambilan sampel (teknik sampling) dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability sampling* dan *Nonprobability sampling*.

1. *Probability sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan memberi peluang yang sama pada anggota populasi. *Probability sampling* ini terdiri dari

simple random sampling, *disproportionate stratified random sampling*, *proportionate stratified random sampling* dan *cluster sampling*. Sedangkan *cluster random sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak dari kelompok-kelompok (*cluster*) yang dipilih dari populasi. Teknik ini digunakan untuk meneliti suatu hal yang menjadi ciri khas atau tersedia di suatu wilayah atau area tertentu.

2. *Nonprobability sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang sama. *Nonprobability sampling* ini terdiri dari: *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling insidental*, *sampling purposive*, *sampling jenuh* dan *snowball sampling*.

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* dengan menggunakan pendekatan *cluster random sampling* karena setiap desa diwakili oleh 2 perangkat desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dalam memberikan data atau mengisi kuisioner.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2022: 39) definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel bebas (*Independen*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab adanya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel ini

bersifat mandiri, artinya keberadaannya tidak tergantung pada variabel lain.

2. Variabel terikat (*Dependen*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat atau dampak, karena adanya variabel bebas. Variabel ini merupakan hasil atau respon dari pengaruh variabel bebas.



Tabel 3.1
Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pengelolaan dana desa adalah kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.	1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Pelaporan. 4. Penatausahaan 5. Pertanggungjawaban	<i>Likert</i>
2	Akuntabilitas (X ₁)	Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik.	1. Tahap Penatausahaan. 2. Tahap pelaporan. 3. Tahap pertanggungjawaban.	<i>Likert</i>
3.	Transparansi (X ₂)	Transparansi sebagai kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.	1. kegiatan pencatatan kas. 2. Laporan realisasi. 3. Laporan pertanggungjawaban.	<i>Likert</i>

Sumber: Hasil kajian penulis

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2022: 222) instrumen penelitian adalah alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara dan, pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen utama dalam peneliti ini adalah kuesioner. Peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur setiap instrumen.

Menurut Sugiyono (2022: 93) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

Tabel 3.2

Pengukuran Instrumen Skala Likert

No	Keterangan	Simbol	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif
1	Sangat Setuju	SS	5	1
2	Setuju	S	4	2
3	Netral	N	3	3
4	Tidak Setuju	TS	2	4
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1	5

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2022:121) uji validitas adalah uji coba pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk melihat sejauh mana responden mengerti akan pertanyaan yang diajukan peneliti. Instrument tersebut digunakan untuk mendapatkan data tersebut valid. "Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur".

Teknik yang digunakan untuk mengukur uji validitas pada penelitian ini adalah *product moment pearson*.

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $sig < 0,05$, maka H_0 ditolak
2. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ atau $sig > 0,05$, maka H_0 diterima
3. Nilai r_{tabel} pada $\alpha = 5\%$ dan $db = n-2$

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2022: 121) uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, maka semakin stabil pula alat pengukur tersebut.

Teknik yang digunakan untuk mengukur uji realibilitas pada penelitian ini adalah *Cronbach Alpha (α)*. Menurut Sugiyono (2022: Kriteria pengambilan keputusan:

1. *Cronbach Alpha* > 0,06 konstruk (variabel) memiliki reliabilitas.
2. *Cronbach Alpha* < 0,06 konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas.
3. Tabel inprestasi nili r *korelasi product moment*.

Uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Interpretasi Nilai r Alpha Indeks Korelasi

Koefisien r	Reliabilitas
0,80-1,00	Sangat tinggi
0,60-0,79	Tinggi
0,40-0,59	Sedang
0,20-0,39	Rendah
0,00-0,19	Sangat rendah

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah langkah penting dalam analisis data statistik, khususnya pada regresi linier. Uji asumsi klasik umumnya diuji meliputi:

1. Uji Normalitas

Menurut Sahir (2021: 69) uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam pengujian ini, digunakan software SPSS lebih terdapat dua metode dalam uji normalitas, antara lain:

a. Metode Uji Sample Kolmogorov Smirnov

Menurut Ghozali (2020:161) menjelaskan bahwa uji normalitas dapat diuji dengan Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka data tidak berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

b. Metode Grafik.

Uji normalitas juga dapat dideteksi dengan melihat penyebaran pada (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Probability Plot. Adapun menurut Ghozali (2020:164) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Menurut Syafrida H.S (2022:69) uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Spearman, dengan langkah yang harus dilakukan dengan menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam hasil regresi dengan menggunakan korelasi Spearman adalah dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{rs\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(rs)^2}}$$

Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk melihat dari angka probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas 0.05 maka, hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada Heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas <0,05 maka, hipotesis ditolak karena data tersebut ada Heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolonieritas

Menurut Syafrida H.S (2021:70) uji multikolonieritas merupakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolonieritas menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL), Multikolonieritas dapat dirumuskan:

$$VIF = (b_i^2) = \frac{1}{(1 - R_j^2)}$$

R^2 = Koefisien Determinasi

VIF merupakan *Variance Inflation Factor*. Ketika R_j^2 mendekati satu atau dengan kata lain ada kolinearitas variabel independen maka VIF akan naik dan jika $R_j^2 = 1$, maka nilai tidak terhingga. Jika nilai VIF semakin membesar, maka diduga ada multikolonieritas antar variabel independen atau jika VIF melebihi angka 10 maka bisa disimpulkan ada multikolonieritas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Syafrida H.S (2021:71) uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi biasanya untuk data *time series* (data runtun waktu) sehingga data ordinal atau interval tidak wajib menggunakan uji autokorelasi.

Kriteria pengambilan kesimpulan :

- a. Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi.
- b. Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$, uji Durbin Waston tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*)

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2019:37) mengatakan analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian, apabila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (terikat), bila dua atau lebih variabel independen (bebas) sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) dan pengelolaan dana desa (Y). Adapun persamaan regresi untuk tiga variabel independen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y: Pengelolaan Dana Desa

α : Konstanta.

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi.

X_1 : Akuntabilitas.

X_2 : Transparansi.

e : Tingkat kesalahan (error).

3.6.4 Uji Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis yang dibuat menggunakan metode analisis sebagai berikut pengujian individu atau parsial (Uji t), (Uji f) dan koefisien determinasi

(R^2) yaitu sebagai berikut:

1. Uji t (Parsial)

Menurut Sahir (2021: 53) Uji t atau parsial merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

- a. jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel dependen.
- b. jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independen.

2. Uji f (Simultan)

Menurut Syafrida H.S (2021:53) percobaan F ini dipakai untuk mengetahui

terdapat atau tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Pembuktian dicoba dengan metode menyamakan angka F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

- a. Variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.
- b. Variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

3. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sahir (2021: 54) "Koefisien Determinasi yang sering disimbolkan dengan (R^2) pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat".

Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KP = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KP = nilai koefisien determinasi

R^2 = nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Gambaran umum objek penelitian adalah gambaran objek di lihat secara luas yang telah diteliti oleh peneliti, sebagai berikut:

4.1.1 Sejarah Kecamatan Belida Darat

Belida Darat yang berdiri tahun 2012 adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Indonesia. Dengan wilayah seluas 264,26 km². Pada tahun 2025, terdapat 14.193 jiwa yang menempati kecamatan ini. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Lembak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir
- Sebelah Timur : Kecamatan Kelekar
- Sebelah Barat : Kota Prabumulih

Wilayah ini membujur dari arah utara ke selatan dan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 34-62 meter dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan pada umumnya datar. Sebagai daerah lembah, wilayah kecamatan Belida Darat termasuk dalam daerah aliran anak sungai Rambang meski tidak cukup besar, di daerah ini juga terdapat banyak sungai-sungai kecil.

4.1.2 Letak Geografis

Pusat pemerintahan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim terletak di Desa Tanjung Bunut berbatas dgn 4 (empat) Dusun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sialingan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gaung Asam
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Babat
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Ibul

4.1.3 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 adalah : “Kabupaten Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Visi Sehat diwujudkan melalui misi sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani
 - b. Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani
2. Visi Mandiri diwujudkan melalui misi sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal
 - b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas
 - c. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik
 - d. Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi
3. Visi Sejahtera diwujudkan melalui misi sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar
 - b. Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri

Misi I :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Mandiri”

Misi II :

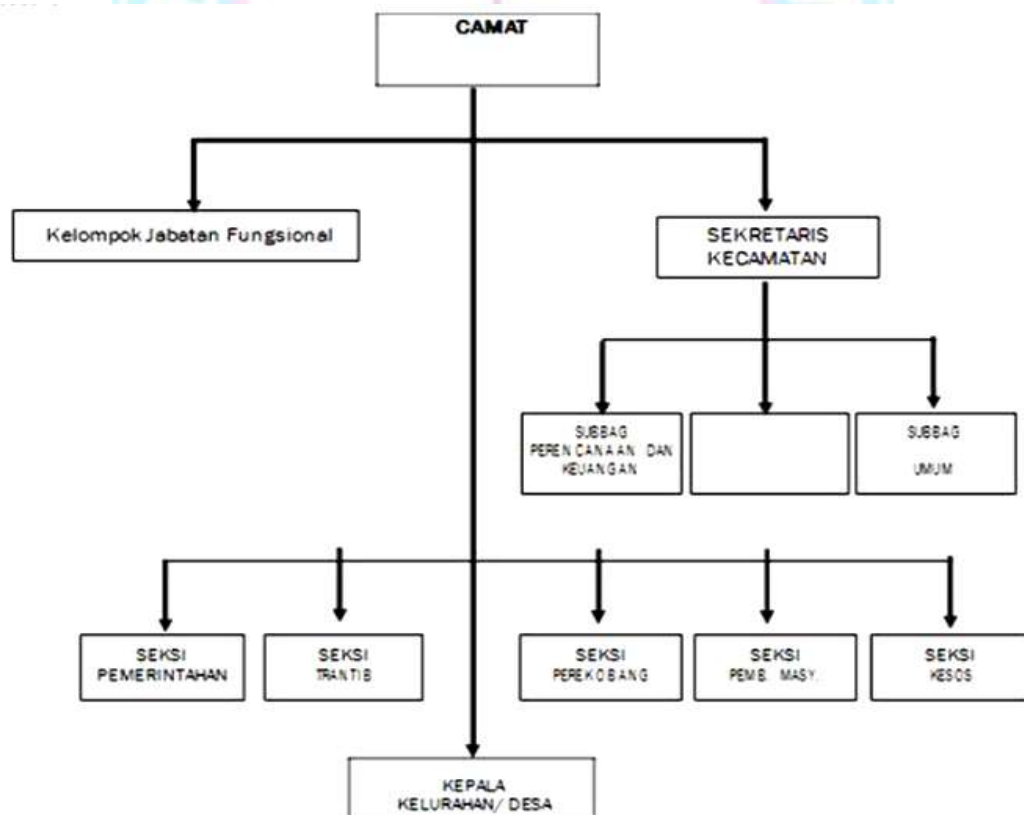
“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan”

Misi III:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan public.

4.1.4 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Responden

Kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden yaitu 2 orang dari masing-masing setiap desa yaitu 10 kepala desa dan 10 orang perangkat desa yang ahli di bidangnya, maka data tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori diantaranya kategori jenis kelamin, usia, pendidikan tertinggi dan lama bekerja responden yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sehingga data tersebut menjadi informatif dan lebih mudah dipahami.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian dari 20 responden, dimana dapat dilihat tabel berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden	Frekuensi	Persentase %
Perempuan	3	15
Laki-laki	17	85
Jumlah	20	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau Sedangkan perangkat desa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 responden atau 85 persen dari total 20 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan

bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim sebagian besar adalah laki-laki.

b. Usia

Berdasarkan hasil penelitian dari 20 responden, dimana dapat dilihat tabel berdasarkan usia kepala desa dan perangkat desa yang berada di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

Usia Responden

Usia Responden	Frekuensi	Persentase %
31 - 40 th	7	35
41 - >50 th	13	65
Jumlah	20	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia hingga tahun sebanyak orang atau persen. Hal ini menggambarkan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang ada di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim yang berusia antara 41 hingga 50 tahun sebanyak 13 adalah perangkat desa yang telah memiliki kemampuan kerja yang baik dalam bekerja.

c. Pendidikan Tertinggi

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Pendidikan Tertinggi

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	SMA	15	75
2	S.1	5	25
TOTAL		20	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan akhir responden adalah tamat Sarjana sebanyak 5 orang atau 25 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang ada di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim memiliki pendidikan akhir yang baik dan akan mempengaruhi pengelolaan dana desa .

d. Lama bekerja

Berdasarkan hasil penelitian dari 20 responden, dimana dapat dilihat tabel berdasarkan masa kerja responden kepala desa dan perangkat desa yang ada di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4 Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase %
≤ 5 th	8	40
5-10 th	12	60
Jumlah	20	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa lama kepala desa dan perangkat desa yang ada di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dalam penelitian sebagian besar lebih dari 5 tahun sebanyak 8 orang atau 40 persen. Hal ini menggambarkan kepala desa dan perangkat desa yang ada di masing-masing Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim sudah banyak berpengalaman dalam bekerja sehingga Pengelolaan dana desa menjadi lebih baik.

4.2.2 Hasil Pengujian Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Kuisisioner yang disebarkan terdiri dari 30 pertanyaan dengan skala rating. Semua data yang terkumpul dianalisis terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya.

Valid tidaknya instrumen penelitian dapat dilihat berdasarkan indeks r dan taraf signifikan 0,05. Apabila harga indeks r lebih besar dari pada harga r yang ditetapkan oleh taraf signifikan 0,05, maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Demikian pula sebaliknya apabila harga indeks r kurang gugur sehingga harus dihilangkan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuisisioner penelitian valid, secara lengkap hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5.
Hasil Uji Validitas
Variabel Akuntabilitas

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,741	0,444	Valid
2	0,209	0,444	Tidak Valid
3	0,588	0,444	Valid
4	0,564	0,444	Valid
5	0,745	0,444	Valid
6	0,088	0,444	Tidak Valid
7	0,615	0,444	Valid
8	0,388	0,444	Tidak Valid
9	0,760	0,444	Valid
10	0,606	0,444	Valid

Sumber: Hasil olah program SPSS (lampiran)

Dari hasil pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS menunjukkan hasil uji validitas 7 item pernyataan variabel Kompensasi (X1) memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($R_{hitung} > R_{tabel}$) yaitu sebesar 0,444, maka pernyataan yang ada pada instrument tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6.
Hasil Uji Validitas
Transparansi

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,928	0,444	Valid
2	0,637	0,444	Valid
3	0,218	0,444	Tidak Valid
4	0,858	0,444	Valid
5	0,928	0,444	Valid
6	0,927	0,444	Valid
7	0,910	0,444	Valid
8	0,141	0,444	Tidak Valid
9	0,626	0,444	Valid
10	0,179	0,444	Tidak Valid

Sumber: Hasil olah program SPSS (lampiran)

Dari hasil pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS menunjukkan hasil uji validitas 7 item pernyataan variabel transparansi (X2) memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($R_{hitung} > R_{tabel}$) yaitu sebesar 0,444, maka pernyataan yang ada pada instrument tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7.**Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa**

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,623	0,444	Valid
2	0,740	0,444	Valid
3	0,601	0,444	Valid
4	0,437	0,444	Tidak Valid
5	0,651	0,444	Valid
6	0,062	0,444	Tidak Valid
7	0,588	0,444	Valid
8	0,674	0,444	Valid
9	0,199	0,444	Tidak Valid
10	0,662	0,444	Valid

Sumber: Hasil olah program SPSS (lampiran)

Dari hasil pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS menunjukkan hasil uji validitas 7 item pernyataan variabel Pengelolaan dana desa (Y) memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($R_{hitung} > R_{tabel}$) yaitu sebesar 0,444, maka pernyataan yang ada pada instrument tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan menghitung koefisien (cronbach) alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS versi 26. Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas sebagaimana data dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Reability Coefficients</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria
X1	7 Item	0,746	Reliabel
X2	7 Item	0,780	Reliabel
Y	7 Item	0,718	Reliabel

Sumber: Hasil olah program SPSS

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *alpha* semua variabel lebih besar dari nilai 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua angkat dalam penelitian ini reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.2.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residu memiliki distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

1. Jika nilai Asymp.sig.> 0,05, maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai Asymp.sig.< 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46069164
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.103
	Negative	-.151
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah program SPSS

Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Asymp.sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah:

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi $>$ dari 0,05.
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Adapun Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

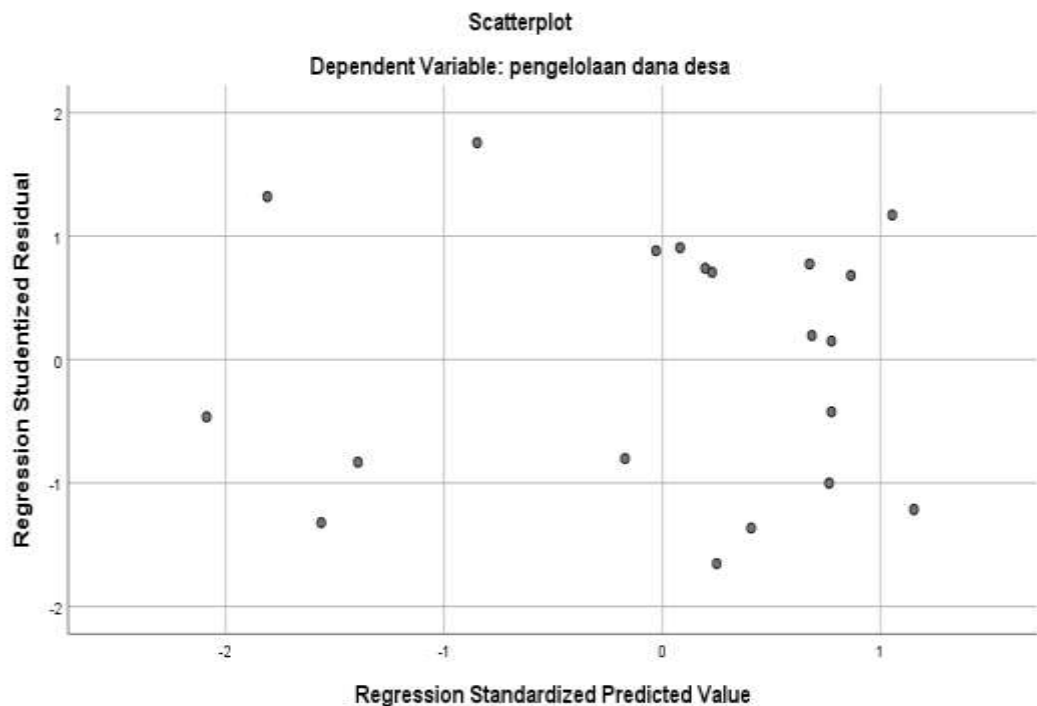
Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig Hitung	Sig	Kriteria
X ₁	0,554	0,5	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X ₂	0,955	0,5	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah program SPSS

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode *glesjer* diperoleh nilai signifikansi lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Adapun Grafik Plot Heteroskedastisitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini :



Sumber: Hasil olah program SPSS

Gambar 4.1 Grafik Plot Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplots di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

3. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis menggunakan SPSS.

Hasil pengujian multikolinearitas pada persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kriteria
X ₁	0,986	1,014	Tidak terjadi multikolinearitas
X ₂	0,986	1,014	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data primer diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikoloniearitas antar variabel independennya.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, regresi berganda berguna mencari suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel yang mempengaruhi (independen) adalah akuntabilitas (X1), transparansi (X2) sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah pengelolaan dana desa (Y).

Adapun Hasil Uji Hasil Regresi Linear Berganda tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11.
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.204	4.288		5.178	.000
	Akuntabilitas	.336	.078	.653	4.298	.000
	Transparansi	.159	.067	.361	2.376	.030
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa						

Sumber: Hasil olah program SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 22,204 + 0,336 X_1 + 0,159X_2 + e$$

Dari persamaan regresi berganda dapat digambarkan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 22,204 berarti jika nilai akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) bernilai 0 maka pengelolaan dana desa adalah sebesar 22,204.
- b. Nilai koefisien akuntabilitas (X1) sebesar 0,336 berarti bahwa jika variabel akuntabilitas meningkat sebesar satu-satuan maka variabel pengelolaan dana desa juga meningkat sebesar 0,336.

- c. Nilai koefisien transparansi (X2) sebesar 0,159 berarti bahwa jika variabel transparansi meningkat sebesar satu-satuan maka variabel pengelolaan dana desa juga meningkat sebesar 0,159.

4.2.2.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan uji statistik t dan uji statistik f dan koefisien determinasi.

1). Uji t (t test)

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Akuntabilitas, dan Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa. Uji t dilakukan dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini :

Tabel 4.12.
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.204	4.288		5.178	.000
	Akuntabilitas	.336	.078	.653	4.298	.000
	Transparansi	.159	.067	.361	2.376	.030

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil olah program SPSS

- 1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana desa Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa t hitung 4,298 > t tabel 2,086, sedangkan nilai sig. 0,000 < 0,05. Dari hasil perhitungan ini maka Ha diterima yang berarti bahwa ada

pengaruh yang signifikan secara parsial Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.

- 2) Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa t hitung $2,376 > t$ tabel $2,086$, sedangkan nilai $\text{sig. } 0,030 < 0,05$. Dari hasil perhitungan ini maka H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa.

2). Uji F (F test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa.

Hipotesis keempat yang diajukan adalah “ X_1 dan X_2 , berpengaruh terhadap Y ”. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Y . Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya dilakukan uji keberartian regresi linear ganda (uji F) sebagai berikut. Adapun Hasil Uji Hasil Regresi Linear Berganda tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini :

Tabel 4.13.
Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60.083	2	30.042	13.460	.000 ^b
	Residual	37.943	17	2.232		
	Total	98.026	19			

a. Dependent Variable: Pengelolaan dana desa

b. Predictors: (Constant), Tansparansi, Akuntabilitas

Sumber: Hasil olah program SPSS

Dari tabel 4.13 diperoleh F_{hitung} sebesar 13.460 > F_{tabel} sebesar 3,10. Hal ini berarti bahwa jika variabel akuntabilitas dan transparansi meningkat sebesar 1 maka nilai variabel pengelolaan dana desa bernilai 13,460.

3). Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS versi 26 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,613. Adapun Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini :

Tabel 4.14.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.567	1.494

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variabel : Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil olah program SPSS

Arti dari koefisien ini adalah bahwa sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel X_1 dan X_2 terhadap Y adalah sebesar 61,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,613 atau 61,3%. Hal ini mengidentifikasi bahwa besarnya kemampuan variasi variabel independen yaitu Akuntabilitas, dan Transparansi, dapat; menjelaskan sebesar 61,3% terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat

Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS versi 26 diperoleh nilai thitung sebesar 4,298 dengan signifikansi 0,000. Keputusan uji H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena nilai thitung $4,298 > t_{tabel} 2,086$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y . Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan keleluasaan (*diskresi*) dan kewenangan. Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Mahmudi (2019), dengan di

terapkannya prinsip akuntabilitas tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat

Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS versi 26 diperoleh nilai thitung sebesar 2,376 dengan signifikansi 0,030. Keputusan uji H_0 ditolak dan H_2 diterima, karena nilai thitung $2,376 > \text{tabel } 2,086$. Nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ dan koefisien determinasi 61,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Transparansi menjadi kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ngakil (2020). Dengan diterapkannya prinsip transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai dicapai. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau anggaran.

4.3.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat

Pengujian secara serentak antara Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan dana desa (Y) menunjukkan hasil yang signifikan. Hipotesis penelitian yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama sama antara Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan analisis memakai alat bantu program SPSS versi 26 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,460 dengan signifikansi 0,000. Keputusan uji H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena nilai F_{hitung} 13,460 > F_{tabel} 3,10. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien determinasi 61,3%. Dengan Kesimpulan: X_1 dan X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y.

Secara serentak Akuntabilitas dan Transparansi untuk mencapai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dengan diarahkan kemampuan manajerial pengelolaan dana desa tepat sasaran dan kinerja yang baik pula. Hal ini dikarenakan juga, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pembangunan di desa. Dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama dan mengawasi seluruh pembangunan di desanya, mengerjakan serta menilai berbagai pekerjaan yang sedang dilakukan. Tugas tersebut akan mudah untuk dilaksanakan jika para pemerintahan desa memiliki ketransparanan dana desa mengadakan pertemuan di balai desa ketika dana dari pemerintah baik dana desa maupun alokasi dana desa di cairkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai t hitung 4,298 > t table 2,086 dan nilai sig 0,00 < 0,05. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang di keluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai t hitung 2,376 > t table 2,086 dan nilai sig 0,030 < 0,05. Dengan diterapkannya prinsip transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai dicapai. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau anggaran dan

memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana dapat diketahui oleh masyarakat.

3. Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai F hitung $13,460 > 3,10$ dan sig $0,00 < 0,05$, dan koefisien determinasi 61,3%. Secara serentak Akuntabilitas dan Transparansi untuk mencapai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dengan diarahkan kemampuan manajerial pengelolaan dana desa tepat sasaran dan kinerja yang baik pula, juga meningkatkan kepercayaan *public* dan mewujudkan pembangunan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Desa di Kecamatan Belida Darat
 - a. Dengan adanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perangkat Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim agar dapat terus meningkatkan laporan keuangan tepat sasaran terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat agar mudah di akses oleh masyarakat.
 - b. Pihak masyarakat desa sebaiknya harus terus memonitoring perkembangan peningkatan pengelolaan dana desa agar nantinya tidak terjadi kesalahan

dan harus baik dalam pelaporan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama yang sama yang akan datang untuk dikembangkan dan diperbaiki, misalnya dengan menambah variable-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M. F. (2023). *Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2020*. (Skripsi). Program Studi Sosiologi, UIN Walisongo Semarang.
- Alba, R. K. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Arfiansyah, M. A. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1-16
- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi Dan Herman Karamoy (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Andriani, U., Zulaika, T., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya Jl Yos Sudarso, F., Jekan Raya, K., Palangka Raya, K., & Tengah, K. (2019). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. <http://ejournal.umm.ac.i>
- Angelina T., and Linda L. Ga. 2021. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK)*. *Jurnal Akuntansi: Transparansi* 10.35508/jak.v9i1.3991.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.
- Berdesa. (2019, April 30). *Beberapa Fungsi Desa Yang Bisa di Optimalkan Berdasarkan Potensinya*. Retrieved Agustus 15, 2020, from berdesa.com: www.berdesa.com/beberapa-fungsi-desaya-yang-bisadioptimalkanberdasarkan-potensi/
- Elnis Gulo, K., & Molinda Kakisina, S. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Irawati, Dina, and Diana Martati. 2019. *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)*. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis* 2017:41-51
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawasti. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 159-180
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Murjana, A. (2020, 04 2020). Pengertian Desa Menurut Para Ahli Serta Fungsi Ciri-Ciri Desa. Dipetik 08 14, 2020, dari rumusrumus.com: <http://rumusrumus.com/pengertian-des/>
- Mualifu, dkk. 2019. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*. Jurnal: Journal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1,
- Nurcholis, H. (2019). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Pemerintah, (2014:140). *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UUno 6 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014 pasal 1)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014:1-34). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa (Permendagri No 114 Tahun 2014)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018:2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuang Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Riset Akuntansi Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar, Ibnu Ngakil. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa "Jaya Tirta" Jurnal Riset Akuntansi Juara 230 "Jaya Tirta."*
- Sugiyono. (2022). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Jogjakarta: Jawa Timur: KBM Indonesia
- Tiara Kasenda, J. S. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 102-110. Diakses pada 27 April 2020,
- Transparansi, P., *Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa* a, P., Yanto, E., & Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin, S. (2020) *Management And Village Fund*. In *Economy Deposit Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Undang-Undang. (Nomor 11 Tahun 2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Pasal 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial Kebijakan Pemeirntah Untuk Penngkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.



Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon sekiranya saudara mengisi data berikut terlebih dahulu (jawaban yang anda berikan. Akan digunakan sebagai data dan bersifat rahasia). Kuesioner ini ditunjukan untuk keperluan skripsi mengenai **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"**

A. Data Perangkat Desa (RESPONDEN)

1. Nama :
2. Desa :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Jabatan :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pertanyaan dengan cermat sebelum anda menjawabnya.
2. Isilah biodata anda dengan benar
3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dan diberikan tanda (✓) jika dianggap benar dan sesuai keadaan anda.
4. Atas ketersediaan anda untuk menjawab kuesioner ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

5. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala likert, yaitu:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Netral (N) = 3

Tidak Setuju (ST) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1



Kuisiioner Akuntabilitas (X₁)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa kami laksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.					
2	Laporan keuangan yang kami sajikan yang telah memuat dan juga mengungkapkan informasi yang cukup memadai.					
3	Pemerintah desa telah mengakui prosedur pelaksanaan pendapatan belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan.					
4	Penyusunan pada suatu laporan pertanggung jawaban yang didalamnya memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap.					
5	Pemerintah dsa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan					
6	Pemerintah desa sudah tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.					
7	Informasi anggaran dana desa bisa dengan mudah diakses atau dilihat di website desa					
8	Realisasi dana desa selali diinformasikan melalui pembuatan spanduk/baliho					
9	Dalam penyusunan laporan keuangan desa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku					
10	Dalam penyampaian laporan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan menyeluruh					

Kuisiioner Transparansi (X₂)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Masyarakat selalu diikutsertakan dalam musyawarah rencana pengelolaan keuangan desa					
2	Adanya akses terhadap informasi mengenai rencana penggunaan keuangan desa.					
3	Pengelolaan keuangan desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan desa kepada seluruh masyarakat.					
4	Keterbukaan informasi mengenai dokumen pelaksanaan pembangunan desa.					
5	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen public tentang pembangunan desa.					
6	Saya merasa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan. usulan/aspirasi masyarakat.					
7	Selalu melibatkan masyakat dalam perencanaan penyusunan arah dan kebijakan APBDes					
8	Selalu menerima kritik dan saran masyarakat dalam perencanaan anggaran					
9	Pemerintah selalu melaporkan progres/kemajuan pelaksanaan pengelolaan keuangan					
10	Pemerintah desa selalu melakukan publikasi laporan keuangan					

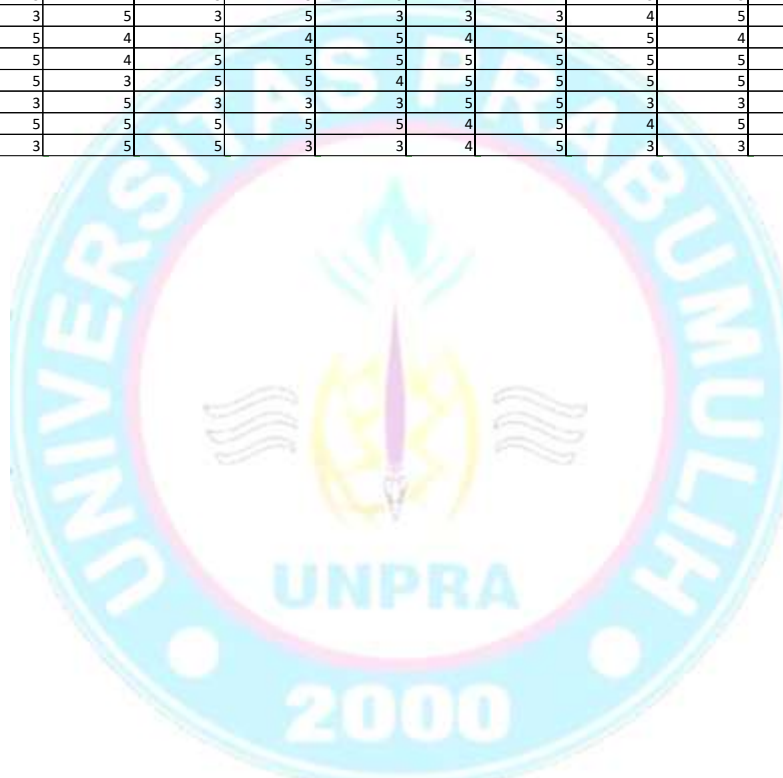
Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.					
2	APBDes yang ditetapkan telah sesuai dengan fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.					
3	Perencanaan mengacu pada asas-asas pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.					
4	Penatausahaan dana desa memenuhi standart dalam peraturan Undang-Undang tentang desa.					
5	Adanya laporan mengenai rincian dana penggunaan dana desa kepada Masyarakat Pertanggungjawaban dana desa.					
6	Adanya proses dan pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus.					
7	Asas-asas transparansi, akuntabel, responsil sssrta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.					
8	Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak.					
9	Bendahara desa membuat buku kas Umum					
10	Bendahara desa membuat buku bank					

Lampiran 3 Tabulasi Responden

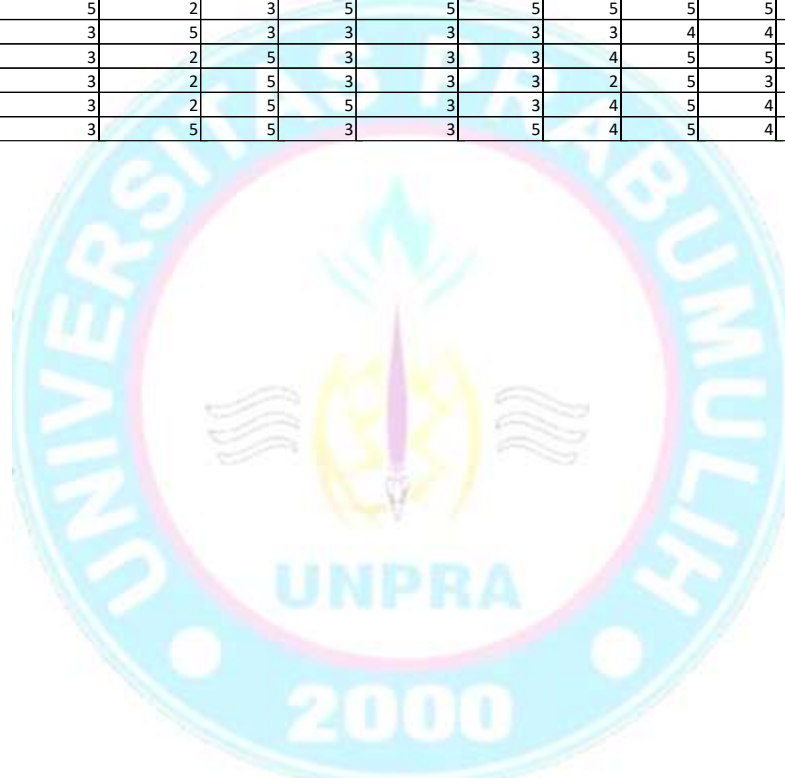
Akuntabilitas (X₁)

Responden	Akuntabilitas										X1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4
2	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5
3	3	3	3	4	3	5	3	5	4	3	3
4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	4
6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4
7	5	3	5	3	3	3	5	3	4	3	3
8	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4
9	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
10	5	3	5	4	5	5	5	3	5	4	3
11	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4
12	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
13	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5
14	3	5	3	5	3	3	3	4	5	5	5
15	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5
16	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5
18	3	5	3	3	3	5	5	3	3	5	3
19	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5
20	3	5	5	3	3	3	4	5	3	3	3



Transparansi (X₂)

RESPONDEN	TRANSPARANSI										X2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	48
2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
3	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	46
4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	47
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
6	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	48
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	47
9	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
10	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	47
11	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	43
12	5	5	2	5	5	5	5	4	5	5	46
13	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	47
14	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	35
15	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	45
16	3	5	3	3	3	3	3	4	4	4	35
17	3	2	5	3	3	3	4	5	5	5	38
18	3	2	5	3	3	3	2	5	3	5	34
19	3	2	5	5	3	3	4	5	4	5	39
20	3	5	5	3	3	5	4	5	4	5	42



Pengelolaan Dana Desa (Y)

RESPONDEN	Pengelolaan Dana Desa										Y
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	46
2	5	3	4	5	5	5	3	4	5	5	44
3	4	3	5	4	4	4	3	3	4	3	41
4	4	3	3	4	5	4	5	5	3	4	44
5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	45
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
7	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	45
8	5	4	3	5	4	5	4	4	5	5	45
9	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	47
10	3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	43
11	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	46
12	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	46
13	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	46
14	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	43
15	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	43
16	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	45
17	3	5	5	5	5	4	5	4	4	5	45
18	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	40
19	3	3	3	4	3	4	3	4	4	5	42
20	4	2	2	4	3	3	5	4	4	3	40



Lampiran 2 spss 26

Pengujian Instrumen

**Hasil Uji Validitas
Akuntabilitas (X₁)
Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	-.145	.843*	.357	.570*	.158	.219	.441	.461*	.169	.741**
	Sig. (2-tailed)		.542	.000	.122	.009	.507	.353	.052	.041	.477	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.2	Pearson Correlation	-.145	1	-.048	.252	-.073	-.373	.427	-.561*	.213	.283	.209
	Sig. (2-tailed)	.542		.841	.283	.760	.105	.060	.010	.368	.227	.376
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.3	Pearson Correlation	.843*	-.048	1	.155	.458*	.058	.330	.232	.232	-.048	.588**
	Sig. (2-tailed)	.000	.841		.514	.042	.807	.155	.325	.325	.841	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.4	Pearson Correlation	.357	.252	.155	1	.261	.000	.101	.189	.843*	.410	.654**
	Sig. (2-tailed)	.122	.283	.514		.266	1.000	.671	.424	.000	.072	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.5	Pearson Correlation	.570*	-.073	.458*	.261	1	.046	.423	.450*	.408	.413	.745**
	Sig. (2-tailed)	.009	.760	.042	.266		.846	.063	.046	.074	.070	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.6	Pearson Correlation	.158	-.373	.058	.000	.046	1	.147	.058	-.114	-.267	.088
	Sig. (2-tailed)	.507	.105	.807	1.000	.846		.537	.807	.632	.256	.711

	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.7	Pearson Correlation	.219	.427	.330	.101	.423	.147	1	-.092	.195	.500*	.615**
	Sig. (2-tailed)	.353	.060	.155	.671	.063	.537		.701	.410	.025	.004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.8	Pearson Correlation	.441	-.561*	.232	.189	.450*	.058	-.092	1	.325	.135	.388
	Sig. (2-tailed)	.052	.010	.325	.424	.046	.807	.701		.162	.571	.091
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.9	Pearson Correlation	.461*	.213	.232	.843*	.408	-.114	.195	.325	1	.553*	.760**
	Sig. (2-tailed)	.041	.368	.325	.000	.074	.632	.410	.162		.011	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.10	Pearson Correlation	.169	.283	-.048	.410	.413	-.267	.500*	.135	.553*	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.477	.227	.841	.072	.070	.256	.025	.571	.011		.005
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TotalX1	Pearson Correlation	.741*	.209	.588*	.654*	.745*	.088	.615*	.388	.760*	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.376	.006	.002	.000	.711	.004	.091	.000	.005	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2.7	Pearson Correlation	.843**	.477*	- .274	.834*	.843**	.834*	1	.042	.691*	.195	.910**
	Sig. (2-tailed)	.000	.034	.242	.000	.000	.000		.861	.001	.409	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.8	Pearson Correlation	.010	- .037	- .061	.073	.010	.073	.042	1	.141	.025	.141
	Sig. (2-tailed)	.967	.878	.800	.761	.967	.761	.861		.553	.916	.553
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.9	Pearson Correlation	.619**	.340	- .522*	.520*	.619**	.520*	.691*	.141	1	.232	.626**
	Sig. (2-tailed)	.004	.142	.018	.019	.004	.019	.001	.553		.324	.003
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.10	Pearson Correlation	.162	- .258	- .106	.219	.162	.219	.195	.025	.232	1	.179
	Sig. (2-tailed)	.496	.271	.656	.354	.496	.354	.409	.916	.324		.449
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TotalX2	Pearson Correlation	.928**	.637*	- .218	.858*	.928**	.927*	.910*	.141	.626*	.179	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.355	.000	.000	.000	.000	.553	.003	.449	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengelolaan Dana Desa (Y)

[illegible]

Y.7	Pearson Correlation	.377	.350	.062	.221	.203	-.521*	1	.527*	.188	.409	.588**
	Sig. (2-tailed)	.102	.131	.794	.348	.391	.018		.017	.428	.074	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.8	Pearson Correlation	.175	.495*	.360	.214	.341	-.150	.527*	1	-.129	.496*	.674**
	Sig. (2-tailed)	.462	.026	.119	.366	.141	.527	.017		.586	.026	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.9	Pearson Correlation	-.036	.372	-.132	.000	.129	-.252	.188	-.129	1	.174	.199
	Sig. (2-tailed)	.879	.106	.578	1.000	.586	.283	.428	.586		.463	.401
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.10	Pearson Correlation	.209	.513*	.208	.431	.293	-.237	.409	.496*	.174	1	.662**
	Sig. (2-tailed)	.376	.021	.380	.058	.210	.314	.074	.026	.463		.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total Y	Pearson Correlation	.623*	.740*	.601*	.437	.651*	-.062	.588*	.674*	.199	.662*	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.005	.054	.002	.794	.006	.001	.401	.001	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dokumentasi Kuisisioner



Kartu Bimbingan Skripsi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Herdiyansah
 NIM : 2021120029
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Blida Darat
 DOSEN PEMBIMBING II : Linggariama, S.E., M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
22/10/2024	Bab I	Kelompok pengantar		
23/10/2024	Bab I	trangor low, trangor atas spare,		
24/10/2024	Bab I	Acc babo I lanjut Bab II		
14/11/2024	Bab II	Perbaiki landasan Teori, Kerangka pemikir		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



AJABAR, S.I.P., M.
NIDN. 0202057601

KAMPUS
Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : kebm@prabumulih.ac.id Website : <http://prabumulih.ac.id>

Dosen Pembimbing II

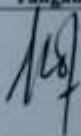


Linggariama, S.E., M.Si
NIDN. 0221018201

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : Herdiyansah
 NIM : 2021120029
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
 Di Kecamatan Belida Darat
 DOSEN PEMBIMBING II : Linggariama, S.E., M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentär	Tanda Tangan	Ket
21/2024 Hap	Bab II	Penomara dan Hbjed, Hupotesis, Kerangka Piker.		
25/2024 Hap	Bab II	ACC Bab II lanjut Bab III		
3/2024 Hap	Bab III	Pertahili jenis penelitian. Telenz pengun pula data, Uji Determinasi, korelasi urut		

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih


 AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II


 LINGGARIAMA, S.E., M.Si
 NIDN. 0221018201

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : Herdiyansah
NIM : 2021120029
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Blida Darat
DOSEN PEMBIMBING I : Chairani Adelina, S.E., M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
28-10-24	Bab 1	Perbaiki Latar Belakang Data awal penelitian referensi dan daftar pustaka	ch.	
05-11-24	Bab 1	Perbaiki teknik penulisan kutipan, himpun kapital, dan spasi	ch.	
06-11-24	Bab 1	Acc	ch.	
03-12-24	Bab 2	Perbaiki teori Dana Desa. Penelitian terdahulu kerangka pemikian Hipotesis penelitian	ch.	
04-12-24	Bab 2	Acc	ch.	
11-12-24	Bab 3	Perbaiki Jenis dan sumber data, populasi dan sampel definisi operasional	ch.	
12-12-24	Bab 3	Acc	ch.	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih

AJABAR, S.IP., M.
NIDN. 0202057601

KAMPUS

Jl. Petra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : info@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

Dosen Pembimbing I

Chairani

Chairani Adelina, S.E., M.Si
NIDN. 0220049201



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : HERDIYANSA
 NIM : 2021120029
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
 PENGELOLAAN DANA DESA
 DOSEN PEMBIMBING II : LINGGARIAMA, S.E., M.SI.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
29/2024 /Apr	Bab IV	Perbaiki mla uji R.		
	IV	Perbaiki cara selanjutnya		
5/2024 /Apr	Bab IV	ACC Bab IV		
	Bab V	ACC Bab V Lanjut uji-a comprehensive		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih

AJABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II

LINGGARIAMA, S.E., M.SI
NIDN. 0221018201

RIWAYAT HIDUP



Herdiyansa lahir pada tanggal 05 September 2005, di Desa Sialingan, Provinsi Sumatra Selatan. Penulis merupakan anak ke empat dari pasangan Bapak Fitrah Ismail dan Ibu Sumarni. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN 12 Lembak pada tahun 2009, dan selesai pada tahun 2015. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMPN 1 Belida Darat dan selesai pada tahun 2018, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Belida Darat, dengan jurusan teknik komputer jaringan dan selesai pada tahun 2021. Setelah itu, pada tahun yang sama tepatnya pada tahun 2021 Penulis memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Prabumulih Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Akuntansi, dan penulis akan lulus pada tahun 2025 . Dengan terus semangat dan tidak pantang menyerah penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan Penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Pesan penulis dikutip dari karakter utama one piece “ luffy mengingatkanku untuk menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya bertahan hidup tetapi hidup dengan utuh, tawa, luka, pilihan, dan cinta”.

